

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 22 Mei 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman 24)	Rabu, 22 Mei 2019	Ibukota Hendak ke Mana?	Presiden Joko Widodo dengan mimik serius kembali menggulirkan wacana pemindahan ibukota. Ia menggelar rapat terbatas di Istana Negara membahas masalah tersebut. Ini memang bukan isu baru.
2	Republika (Halaman 24)	Rabu, 22 Mei 2019	Palangkaraya dan Angan Sukarno	Presiden Sukarno yang pertama kali melontarkan ide memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah. Tepatnya di kota Palangkaraya. Kota ini dibelah oleh sungai Kahayan. Keinginan Sukarno memindahkan ibukota negara dilontarkan pada 1950-an. Ia sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali.
3	Republika (Halaman 24-25)	Rabu, 22 Mei 2019	Nasib Tuan Rumah Olimpiade	Indonesia sedang mengusulkan Jakarta sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di dunia, yakni olimpiade tahun 2032. Inilah pesta olahraga paling bergengsi di planet Bumi. Sekitar 13 tahun lagi kita akan sampai pada 2032. Di sisi lain, muncul wacana kuat dari Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke tempat lain. Kota Palangkaraya disebut-sebut sebagai calon paling kuat.
4	Republika (Halaman 24-25)	Rabu, 22 Mei 2019	Palangkaraya Siapkan Lahan	Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengaku telah menyediakan lahan seluas 300.000 hektare untuk persiapan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. "Saya Cuma siapkan lahan. Luas lahan yang saya sampaikan ke Pak Presiden itu 300.000 hektare," ujar Sugianto.
5	Media Indonesia (Halaman 8)	Rabu, 22 Mei 2019	Infrastruktur Jalan Siap Dilalui Arus Mudik	Sistem satu arah di tol dari Jakarta ke Jawa Tengah mulai 30 Mei hingga 2 Juni direncanakan dari Km 25 sampai Km 263. Pemerintah memastikan kondisi jalan nasional, siap digunakan untuk arus mudik. Untuk Tol Trans-Jawa yang sudah tersambung 956 kilometer (km) keadaannya juga sudah sangat baik. Berbagai fasilitas pendukung seperti lampu dan rambu jalan juga telah terpasang.
6	Kompas (Halaman 15)	Rabu, 22 Mei 2019	Libatkan Pemda dalam Penataan Pulau Terluar	Paradigma penataan pembangunan di pulau terluar perlu diubah agar tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin dilibatkan dalam penataan pulau terluar. Selama ini, pemerintah pusat dianggap terlalu fokus menjaga keutuhan wilayah, tetapi melupakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
7	Kompas (Halaman 15)	Rabu, 22 Mei 2019	Berita Foto	Sejumlah fasilitas tempat istirahat bagi pemudik yang melintasi jalan tol mulai disiapkan, seperti di ruas Jalan Tol Semarang-Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019). Sejumlah titik di sepanjang ruas Jalan Tol Trans-Jawa tersebut disiapkan tempat istirahat dengan fasilitas toilet, tempat makan, dan pengisian bahan bakar minyak.
8	Koran Tempo (Halaman 6)	Rabu, 22 Mei 2019	Berita Foto	Sejumlah kendaraan melintas di jembatan Kali Kuto, jalur Trans Jawa jalan tol Batang, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jembatan ini dapat mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik Lebaran di Exit Tol Gringsing, Kendal.

9	Koran Tempo (Halaman 16)	Rabu, 22 Mei 2019	Diskon Tarif Jalan Tol Berlaku Pekan Ini	Potongan tarif jalan tol dan penyeberangan menjadi siasat mengatur arus pemudik. Kepala Badan Pengatur Jalur Tol, Danang Parikesit, mengatakan pekan ini akan menetapkan adanya diskon tarif jalan tol selama masa mudik Idul Fitri. "Karena sifatnya voluntary, yang akan mengumumkan adalah badan usaha jalan tol (BUJT)," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 3)	Rabu, 22 Mei 2019	Investor China Siap Danai Tol	Minat investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia kian kuat, terutama di jalan tol. Perusahaan asal China kabarnya bakal meneken kesepakatan investasi sebesar Rp23 triliun dengan salah satu perusahaan jalan tol di Indonesia.
11	Bisnis Indonesia (Halaman 4)	Rabu, 22 Mei 2019	Pemindahan Ibukota: APBN Alokasikan Rp36 Triliun	Anggaran pemerintah yang akan dipakai untuk pembiayaan pemindahan ibukota diperkirakan hanya sekitar 7,72% atau sekitar Rp36 triliun dari total biaya pemindahan ibukota yang mencapai Rp466 triliun. Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Eko Putro Adijayanto menegaskan bahwa skema pendanaan yang akan dipakai adalah model kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership/PPP).
12	Bisnis Indonesia (Halaman 4)	Rabu, 22 Mei 2019	Berita Foto	Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5). Rapat membahas persiapan penyediaan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik Lebaran 2019.
13	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 22 Mei 2019	Sistem Satu Arah: Dilema di Balik Euforia Trans-Jawa	Seolah ingin mengulang kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran pada tahun lalu, pemerintah tampak melakukan persiapan cermat menjelang mudik pada tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemudik yang tinggal di Jabodetabek kini bisa menikmati jalan tol Trans-Jawa yang sudah tersambung dari Merak hingga Probolinggo. Secara keseluruhan, jalan tol yang tersambung Merak—Probolinggo mencapai 964 kilometer.
14	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Rabu, 22 Mei 2019	Mudik Lebaran: Perbaikan Jalan Lintas Sumatra Diutamakan	Kementerian PUPR fokus memperbaiki jalan nasional di Sumatra menjelang masa angkutan mudik Lebaran 2019. Kondisi jalan nasional di Sumatra masih mengalami kerusakan di beberapa titik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kondisi jalan di Sumatra perlu mendapat perhatian lebih karena kondisinya kurang siap dilintasi pemudik dibandingkan dengan di Jawa. Kemantapan jalan di lintas utara, tengah, dan selatan Jawa mencapai di atas 93%.
15	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Rabu, 22 Mei 2019	Berita Foto	Foto aerial perumahan KPR subsidi di Kampung Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat setidaknya hingga Mei 2019, jumlah capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah mencapai angka 318.835 unit.

Judul	Ibukota Hendak ke Mana?	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 24)		
Resume	Presiden Joko Widodo dengan mimik serius kembali menggulirkan wacana pemindahan ibukota. Ia menggelar rapat terbatas di Istana Negara membahas masalah tersebut. Ini memang bukan isu baru.		

PUSPI PERWITASARI/ANTARA

IBU KOTA Hendak ke Mana?



● OLEH SELAMAT GINTING

Pemerintah merancang ibu kota baru Indonesia akan dibagi dalam empat kawasan wilayah. Apa sajakah?

Presiden Joko Widodo dengan mimik serius kembali menggulirkan wacana pemindahan ibu kota. Ia menggelar rapat terbatas di Istana Negara membahas masalah tersebut. Ini memang bukan isu baru.

Bahkan sudah ada sejak 1957 kala Presiden Sukarno mewacanakan Palangkaraya di Kalimantan sebagai calon ibu kota baru. Bukan cuma Sukarno. Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mewacanakannya.

"Pemerintah merancang ibu kota baru Indonesia akan dibagi dalam empat kawasan wilayah. Mulai zona pusat pemerintahan, zona ibu kota negara (IKN), dan zona IKN yang menjadi lokasi konservasi, tempat tinggal dan pusat sarana publik," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, Kamis (16/5/2018) lalu.

Jangka menengah

Keseriusan pemerintah memindahkan pusat ibukota, tercermin dengan dimasukkannya rencana tersebut ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemindahan ibu kota ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 300 triliun hingga Rp 400 triliun. Pemerintah mengklaim tidak akan meng-

ganggu APBN, karena lahan yang digunakan adalah lahan negara. Pilihan pemerintah, lanjut Bambang, mengerucut ke tiga wilayah di Kalimantan, yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

"Tahun 2020 adalah penyelesaian semua tahap perencanaan kawasan termasuk master plan sampai perencanaan wilayah kotanya, hingga detail desain. Tahun 2021 bisa dilakukan ground breaking dan mulainya fase konstruksi seperti konstruksi dasar, fasilitas perkantoran, rumah tempat tinggal, dan sarana penunjang. Kita harapkan tahun 2024 sudah bisa dimulai proses berfungsinya pusat pemerintahan baru dari Indonesia," kata Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Beban Jakarta sebagai ibu kota negara memang sudah terlalu besar. Mulai dari pemerintahan, ekonomi, bisnis, hingga pariwisata. Beban itu sangat berat untuk Jakarta yang hanya memiliki luas daratan 661,52 kilometer persegi. Sehingga Jakarta tidak bisa menampung lagi untuk ibu kota pemerintahan.

Tetapi tentu saja pemindahan ibu kota bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu persiapan sangat matang. Termasuk kesiapan infrastruktur fisik seperti gedung-gedung pemerintahan, jalan, hingga sumber daya manusia. Kantor presiden dan wakil presiden, kantor-kantor kementerian dan lembaga setara dengan kementerian, gedung MPR/DPR/DPD serta lembaga tinggi negara lainnya.

Jelas, perlu persiapan matang agar bisa terlaksana hanya dalam satu hingga dua tahun ke depan. Jika tidak siap, akan menimbulkan kegaduhan bahkan penolakan dari pihak-pihak yang tidak setuju.

Penolakan

Sudah terbayang, pihak-pihak yang menolakan wacana pemindahan ibukota. Antara lain aparat sipil negara (ASN) atau karyawan

BUMN pemerintah pusat. Sebab mereka sudah merasa nyaman dan menetap di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek.

Tak kalah garang adalah para anggota DPR. Maklumlah mereka sedang mempersiapkan perluasan gedung yang baru di Jakarta. Namun tiba-tiba harus legawa pindah ke luar Jakarta. Untuk itu wacana pemindahan ibu kota tersebut perlu mendapatkan dukungan dari DPR.

Beberapa undang-undang juga perlu diubah, terutama yang terkait dengan penyebutan ibukota negara. Misalnya keberadaan Universitas Indonesia (UI), harus berada di dalam ibu kota negara. Kini kampus UI pun sudah bergeser ke Depok, Jawa Barat. Wilayah perbatasan Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan dengan Kecamatan Beji, Depok.

Rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ternyata menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Ia menyampaikan usulan itu setelah menyaksikan hasil *quick count* sejumlah lembaga survei menempatkan Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019.

Presiden Jokowi telah menggelar rapat tertutup membahas pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memaparkan hasil kajiannya tentang pemindahan ibukota.

Tiga opsi

Menurut Bambang, terdapat tiga opsi yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta. Kedua, ibukota dipindahkan di wilayah radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Jawa.

Dari semua pilihan tersebut, Jokowi cenderung memilih opsi terakhir untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Kota di Kali-

mantan dan Sulawesi banyak disebut akan menjadi tujuan relokasi ibukota ini. Namun, bukan hanya kali ini wacana pemindahan ibu kota dibahas di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, pembicaraan mengenai urgensi pemindahan ibu kota sempat beberapa kali dilakukan. Bukan hanya era Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saja. Kala Bappenas dipimpin Andrinof Chaniago, pernah juga mengkaji pemindahan ibukota.

Andrinof pernah menyebut kota di Kalimantan lebih potensial untuk dijadikan ibu kota Indonesia daripada kota di Jawa. Ia menyebut beberapa nama kota di Kalimantan, seperti Pangkalan Bun dan Sampit di Kalimantan Tengah, atau Paser dan Penajem di Kalimantan Timur.

Iroisnya, Andrinof sama sekali tidak merekomendasikan Palangkaraya akan menjadi calon kuat. Bahkan Palangkaraya tidak direkomendasikan oleh Andrinof. Alasannya, Palangkaraya tidak memiliki daya dukung lahan yang memadai.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyebut instruksi ini muncul setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Palangkaraya pada 2016. "Ada keinginan masyarakat di Palangkaraya mengacu pada pernyataan Bung Karno, untuk dijadikannya ibu kota negara di Palangkaraya," kata Johan.

Palangkaraya diharapkan dapat mengurugi Jawa Tengah dan mengubahnya menjadi Indonesia Centris. Menurut Kepala Bappenas kajiannya yang dilakukannya akan rampung pada 2019.

Bambang mengukui alasan pemindahan ibu kota ke luar Jawa, karena terjadi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan pulau lainnya yang begitu jauh. Kelak, ibu kota baru akan dijadikan pusat pemerintahan dan akan di bangun Istana Presiden dan kantor kementerian bersama di Palangkaraya. ■

Judul	Palangkaraya dan Angan Sukarno	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 24)		
Resume	Presiden Sukarno yang pertama kali melontarkan ide memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah. Tepatnya di kota Palangkaraya. Kota ini dibelah oleh sungai Kahayan. Keinginan Sukarno memindahkan ibukota negara dilontarkan pada 1950-an. Ia sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali.		

PALANGKARAYA DAN ANGAN SUKARNO

Presiden Sukarno yang pertama kali melontarkan ide memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah. Tepatnya di kota Palangkaraya. Kota ini dibelah oleh sungai Kahayan. Keinginan Sukarno memindahkan ibukota negara dilontarkan pada 1950-an. Ia sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali.

"Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Sukarno saat pertama kali menandatangani tonggak pembangunan kota ini pada 17 Juli 1957.

Apa alasan Sukarno memilih Palangkaraya? Pertama; Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua; menghilangkan sentralistik Jawa. Ketiga; pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Ia ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinal.

Keempat; Jakarta punya sungai Ciliwung, Palangkaraya juga punya sungai Kahayan. Sukarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya. Ia ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.

"Janganlah mendirikan bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Sebab lahan itu hendaknya diperuntukkan bagi taman, sehingga pada malam hari terlihat klerap-ker-

lip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut," kata Sukarno dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka. Penulis Marwati Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1990.

Bantuan Uni Soviet

Untuk mewujudkan ide tersebut, Sukarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari negara komunis terbesar itu ditandatangani untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik. Tapi seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 1960-an, pembangunan Palangkaraya terhambat.

Puncaknya pasca 1965, stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan negara terganggu. Sukarno pun dilengserkan dari singasana kekuasaannya.

Maka, sejak itu, Palangkaraya tinggal kenangan. Kini ramalan Sukarno menjadi kenyataan: Jakarta semakin semrawut! Sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Nyaris tak ada tanda-tanda kota ini pernah akan menjadi ibukota RI yang megah. Hanya sebuah monumen sejarah. Pengingat Sukarno pernah punya mimpi besar memindahkan ibukota ke Palangkaraya.

Kini, Jakarta sebagai ibukota negara, semakin tidak layak. Siapa pun yang menjadi gubernurnya, akan kesulitan mengatasi segudang masalah. Mulai dari kemacetan akut, kepadatan penduduk, pembangunan tak terencana, hingga banjir yang selalu mengintai jika musim hujan



PUTRA M. AKBAR/REPUBLIKA

datang.

Jakarta Kota Rawa

Rawa Mangun, Rawa Angke, Rawa Gede, Rawa Belong, dan beberapa nama lain yang menggunakan kata rawa. Nama-nama itu menunjukkan beberapa wilayah Jakarta secara alami memang kawasan rawa. Sehingga tidak tepat dijadikan pemukiman atau pusat kota. Orang Belanda yang pertama kali membangun Batavia memahami wilayah ini berawa-rawa. Namun Belanda memiliki keahlian khusus di bidang hidrologi.

Para arsitek Negeri Kincir Angin itu membangun Batavia mengacu pada pembangunan di negerinya. Negeri Belanda, tiga perempat lahannya awalnya berada di bawah

permukaan air laut. Namun disulap menjadi kota untuk tempat tinggal. Pengetahuan dan teknologi itu pula yang digunakan merekayasa Batavia. Dari rawa-rawa itu menjadi satu kota yang besar.

Sejak 1920-an

Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah lain bukan hal baru. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pada awal 1920-an, Belanda sudah merencanakan pemindahan ibukota dari Batavia ke Bandung. Beberapa wilayah juga pernah dijadikan alternatif ibukota pengganti Jakarta. Misalnya Palangkaraya, Jonggol (Bogor, Jawa Barat), Purwokerto, Lampung, Karawang, dan Palembang.

Sejarah mencatat, Indonesia

pernah memindahkan ibukotanya beberapa kali pada 1945-1950. Jatuhnya ibukota Jakarta yang dikuasai Belanda, membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan utusannya dan menawarkan Yogyakarta menjadi ibukota negara. Saran ini disetujui Presiden Sukarno. Pada 4 Januari 1946, ibukota Indonesia resmi pindah ke Yogyakarta. Istana Negara pindah ke Gedung Agung, berseberangan dengan Benteng Vredeburg.

Namun, saat Belanda melancarkan Agresi Militer II, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Para pimpinan negara ditangkap. Dalam keadaan darurat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan ibukota kembali dipindahkan lagi. Dipilihlah Kota Bukittinggi, Sumatra Barat. Alasannya, karena Sjafrudin Prawiranegara disiapkan untuk memimpin pemerintahan darurat jika para pemimpin nasional ditangkap.

Pada 17 Agustus 1950, ibukota dikembalikan ke Jakarta berdasarkan UUD Sementara tahun 1950 dalam pasal 46.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10, Tahun 1964, ditetapkan Jakarta sebagai ibukota negara. Disahkan pada 31 Agustus 1964 oleh Presiden Sukarno. Sejak itu, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pemerintah mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota.

■ selamat ginting

Judul	Nasib Tuan Rumah Olimpiade	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 24-25)		
Resume	Indonesia sedang mengusulkan Jakarta sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di dunia, yakni olimpiade tahun 2032. Inilah pesta olahraga paling bergengsi di planet Bumi. Sekitar 13 tahun lagi kita akan sampai pada 2032. Di sisi lain, muncul wacana kuat dari Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke tempat lain. Kota Palangkaraya disebut-sebut sebagai calon paling kuat.		

Nasib Tuan Rumah Olimpiade



● OLEH SELAMAT GINTING

Bagaimana nasib Kota Jakarta yang diusulkan sebagai tuan rumah Olimpiade 2032, jika kelak ibu kota juga akan pindah?

Indonesia sedang mengusulkan Jakarta sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di dunia, yakni olimpiade tahun 2032. Inilah pesta olahraga paling bergengsi di planet Bumi. Sekitar 13 tahun lagi kita akan sampai pada 2032. Di sisi lain, muncul wacana kuat dari Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain. Kota Palangkaraya disebut-sebut sebagai calon paling kuat.

"Pemerintah memantapkan rencana untuk memindahkan ibu kota. Selain untuk mengurangi beban Pulau Jawa, meratakan pembangunan, pemindahan ibu kota bertujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan yang mendunia," kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, baru-baru ini.

Bagaimana kelanjutannya? Masih harus menunggu hasil Pemilu Presiden 2019 ini. Siapa pun yang terpilih sebagai presiden, tentu akan memengaruhi rencana kepindahan ibu kota tersebut.

Yang jadi masalah, bagaimana dengan Kota Jakarta yang diusulkan sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 jika kelak ibu kota juga akan pindah dari Jakarta? Bukan tidak mungkin komite olimpiade akan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tentu bukan perkara teknis belaka.

Pengalaman AG 1962

Kita bisa lihat pengalaman sejarah pada era Presiden Sukarno. Saat itu pada 1957, ia berencana menjadikan Palangkaraya sebagai calon ibu kota masa depan Indonesia. Bung Karno ingin memisahkan antara urusan pengendalian pemerintahan dan kenegaraan.

Namun, usaha Sukarno kandas, selain politis dan faktor pengabdian bahan serta medan yang sulit. Saat itu Indonesia sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa-bangsa Asia, Asian Games (AG) 1982. Termasuk ajang olahraga pertandingan olimpiade. Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Komite olahraga Asia sudah menentukkan Jakarta sebagai tuan rumah AG 1962. Tentu tidak mudah jika harus dipindahkan ke Palangkaraya. Sebab, perencanaan dan pembangunan kompleks Gelanggang Olahraga Senayan sudah dilakukan.

Hal serupa terjadi pada era Presiden Soeharto. Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah dicanangkan sebagai lokasi alternatif ibu kota. Ratusan hektare lahan di kawasan ini sudah dibebaskan oleh sejumlah pengembang. Namun, rencana itu terhenti dan tak ada kabarnya lagi setelah Presiden Soeharto lengser. Ribuan hektare tanah yang dibebaskan,

kini menjadi hutan ilalang.

Setelah era Soeharto, nyaris tidak ada lagi pembahasan tentang pemindahan ibu kota. Baik Baharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maupun Megawati Soekarnoputri. Rencana pemindahan ibu kota muncul lagi pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejak 2009, SBY mengajukan tiga skenario perpindahan ibu kota yang perlu didiskusikan oleh publik.

Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, dan kota ekonomi serta perdagangan. Konsekuensinya pada pembenahan total atas soal macet. Kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru (*totally new capital*). Ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, tapi memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

Ia mengajak semua komponen bangsa membahas secara terbuka tiga opsi tersebut. Sebab, kebijakan perpindahan ibu kota dan pengeseran pusat pemerintahan, harus menjangkau strategi jangka panjang bangsa.

Setelah perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Presiden Joko Widodo berwacana mengajukan diri menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade 2032. Jika rencana menjadi tuan rumah olimpiade serius, sesungguhnya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain, termasuk ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi tertutup.

Terlebih lagi jika pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, hanya akibat adanya pengaruh dikotomi Jawa-luar Jawa. Bahkan, akibat ketidakmampuan pemerintah melakukan upaya pemerataan pen-

diduk dan pemerataan kecepatan pembangunan Jawa - luar Jawa.

Perspektif pertahanan

Menurut mantan asisten Sosial Politik ABRI, Mayjen (Purn) Suwarno Adiwijoyo, dilihat dari perspektif pertahanan yang mendalam, lokasi ibu kota negara di DKI Jakarta juga tidak ideal. Bahkan, sangat rawan terhadap serangan udara yang dikombinasikan dengan tembakan meriam dari kapal perang.

Malah tidak memungkinkan untuk memberi ruang-waktu bagi upaya penyelamatan pusat pemerintahan negara, akibat terbatasnya lokasi gelar artileri pertahanan udara. Namun, pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, juga tidak lebih ideal. Bukan hanya karena rawan terhadap kemungkinan adanya konsentrasi kekuatan pasukan darat lawan. Sebab, pasukan asing dapat digelar dan disusupkan melalui perbatasan darat dengan negara lain, misalnya Malaysia.

"Wilayah perbatasan darat dengan Malaysia merupakan garis lingkaran pertahanan terdepan. Sehingga wilayah Kalimantan Tengah juga bukan merupakan daerah belakang, yang memungkinkan dijadikannya sebagai ibu kota negara yang ideal," kata Suwarno.

Diungkapkan, penataan Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki dua sisi kepentingan yang berbeda. Pertama, sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat bisnis atau perekonomian. Kedua, juga untuk kepentingan menghadapi penyelenggaraan Olimpiade 2032.

Indonesia perlu berkaca kepada postur ibu kota di berbagai negara, yang selalu memisahkan pusat pemerintahan negara dengan pusat bisnis atau perekonomian. Seperti halnya lokasi ibu kota negara Amerika Serikat, bukan di New York yang merupakan pusat bisnis, melainkan di Washington DC.

Demikian pula, dengan Malaysia. Meskipun ibu kota negara tetap di Kuala Lumpur, lokasi pusat pemerintahan negara dipindahkan ke Putrajaya. Berarti selain tetap sebagai ibu kota negara, Kuala Lumpur hanya menjadi pusat bisnis dan pendidikan.

Lihat pula pengalaman penataan ibu kota negara Jepang. Mereka sedang bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Wilayah ibu kota Tokyo, harus melakukan reklamasi untuk dapat memekarkan luas wilayahnya hingga di luar Tokyo.

Kita pun punya pengalaman berharga pada penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu. Ternyata tidak dapat dilakukan secara terpusat di DKI Jakarta. Mesti ditambah dengan Palembang, bahkan ada juga di wilayah Jawa Barat.

Belajar dari Tokyo maka yang paling mudah dan praktis adalah dengan mengembangkan luas ibu kota negara. Jakarta dipertahankan wilayahnya dengan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kalau perlu ditambah hingga Bandung. Sehingga Jabodetabek plus Bandung menjadi satu provinsi ibu kota negara. Namun, lanjut Suwarno, ide itu pun masih harus dikaji secara komprehensif. Termasuk dari perspektif pertahanan negara.

Selain tentu saja kelayakannya sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perekonomian, dan sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade 2032. Dengan alasan itu, apabila harus memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, tertutup oleh rencana untuk mengajukannya dari Jakarta menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. ■

Judul	Palangkaraya Siapkan Lahan	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 24-25)		
Resume	Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengaku telah menyediakan lahan seluas 300.000 hektare untuk persiapan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. "Saya Cuma siapkan lahan. Luas lahan yang saya sampaikan ke Pak Presiden itu 300.000 hektare," ujar Sugianto.		

Palangkaraya Siapkan Lahan

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengaku telah menyediakan lahan seluas 300.000 hektare untuk persiapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. "Saya cuma siapkan lahan. Luas lahan yang saya sampaikan ke Pak Presiden itu 300.000 hektare," ujar Sugianto. Ia mengharap rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya tidak hanya sekedar wacana. Sebab hal itu merupakan keinginan dari sosok pendiri bangsa, Presiden Sukarno. Ia menjelaskan Palangkaraya memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Secara geografis terletak di tengah pulau Kalimantan dan relatif aman dari berbagai bencana alam.

Kesalahan Jakarta

Palangkaraya tentu saja harus belajar dari kesalahan Jakarta. Hingga saat ini, Jakarta harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk. Belum lagi masalah banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.

Kasus-kasus penyimpangan peruntukan lahan dan privatisasi lahan di Jakarta, telah menghabiskan persediaan taman kota. Kemacetan lalu lintas, menurunnya interaksi sosial karena gaya hidup yang individualistik juga menjadi penyebab warga Jakarta

mengalami tingkat stress tinggi," seperti terungkap dalam makalah 'Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara' oleh mahasiswa magister ilmu administrasi STIAM I Jakarta, Ika Luswara dan Olivia Aprinaes.

Tata ruang kota yang tidak partisipatif dan tidak humanis menyisakan ruang-ruang sisa yang mengundang tindak laku kriminalitas. Belum lagi kasus pengurusan kampung miskin dan pengurusan lahan usaha informat oleh pemerintah. Inilah yang menjadi penyebab aktif kemiskinan di Jakarta.

Ada pula tata ruang kota yang sering berubah-ubah, menyebabkan polusi udara dan banjir sulit dikendalikan. Walaupun pemerintah telah menetapkan wilayah selatan Jakarta sebagai daerah resapan air (Perda Nomor 1 Tahun 2012), namun ketentuan tersebut sering dilanggar.

Beberapa wilayah yang diperuntukkan untuk pemukiman, banyak yang beralih fungsi menjadi tempat komersial.

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km, dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau terbesar kedua di dunia. Dilihat dari luas wilayah dan banyaknya penduduk, ruang gerak menjadi sempit.

Embrio sapatisme

Di sisi lain, pembangunan yang

terus terjadi di Jakarta dan di Pulau Jawa akan membuat daerah lain seperti di anak tirikan. Hal tersebut membuktikan masih adanya pembangunan yang tidak merata di segala bidang. Semakin timpangnya pembangunan di Pulau Jawa, menurut mantan Asisten Sosial Politik ABRI, Mayjen (Purn) Suwarno Adiwijoyo, bukan hanya memunculkan fenomena Jawa – luar Jawa saja. Melainkan justru akan semakin menyuburkan tumbuhnya kecemburuan sosial.

"Bahkan jika terus bergulir dan tidak segera diatasi, akan menumbuhkan embrio separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara," katanya.

Padahal pesatnya pembangunan di Pulau Jawa, lanjutnya, bukan akibat pemerintahan bertindak tidak adil dan diskriminatif. Tetapi justru karena kepadatan jumlah penduduk Pulau Jawa yang melebihi daya dukung wilayah. Sehingga bukan hanya mengharuskan dibangunnya berbagai infrastruktur wilayah saja. Melainkan juga akan menarik minat para investor dari dalam dan luar negeri, untuk berinvestasi diberbagai bidang dan sektor pembangunan.

Banyak yang tidak memahami, sesungguhnya yang mengakibatkan pesatnya pembangunan di Pulau Jawa justru karena banyak jumlah penduduk yang melebihi daya dukung wilayah. Kota-kota besar yang kebanjiran urbanisasi dari desa,



AKBAR NURROHDI BUMAYANTARA

terbukti bukan hanya mengakibatkan berbagai kerawanan sosial. Malah mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Bukan hanya pembangunan sarana dan prasarannya semata.

Pemda di luar Pulau Jawa harus mengubah paradigma untuk mempercepat kemajuan pembangunan. Tak bisa hanya mengandalkan pertambahan jumlah penduduk lokal. Mereka harus mau menerima kehadiran penduduk pendatang. Termasuk melalui program transmigrasi.

Terlebih lagi jika menolak kehadiran penduduk pendatang yang berminat menjadi petani untuk mengolah lahan yang termarginalkan, melalui program pencetakan lahan dan program

penambahan jumlah desa atau pusat pengembangan wilayah pembangunan agrobisnis atau agroindustri.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, akan sangat menentukan kemajuan dan kecepatan pembangunan di daerahnya. Terlebih lagi jika ingin dapat mengimbangi kecepatan pembangunan di Pulau Jawa. Sebab tidak akan efisien pembangunan sarana dan prasarana bandara maupun pelabuhan, jika setiap hari tidak ada manusia dan barang yang dimuat.

Pembangunan sarana dan prasarana jalan raya, jika setiap hari tidak banyak kendaraan yang lalu lalang mengangkut manusia dan hasil produksi, tidak akan ada gunanya. ■ selamat giting

Judul	Infrastruktur Jalan Siap Dilalui Arus Mudik	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 8)		
Resume	Sistem satu arah di tol dari Jakarta ke Jawa Tengah mulai 30 Mei hingga 2 Juni direncanakan dari Km 25 sampai Km 263. Pemerintah memastikan kondisi jalan nasional, siap digunakan untuk arus mudik. Untuk Tol Trans-Jawa yang sudah tersambung 956 kilometer (km) keadaannya juga sudah sangat baik. Berbagai fasilitas pendukung seperti lampu dan rambu jalan juga telah terpasang.		

Infrastruktur Jalan Siap Dilalui Arus Mudik

Sistem satu arah di tol dari Jakarta ke Jawa Tengah mulai 30 Mei hingga 2 Juni direncanakan dari Km 25 sampai Km 263.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PEMERINTAH memastikan kondisi jalan, baik tol maupun jalan nasional, siap digunakan untuk arus mudik. Untuk Tol Trans-Jawa yang sudah tersambung 956 kilometer (km) keadaannya juga sudah sangat baik. Berbagai fasilitas pendukung seperti lampu dan rambu jalan juga telah terpasang.

"Ada 956 km yang sudah beroperasi. Ada juga yang sudah bisa digunakan, tapi masih

fungsional seperti Pandaan-Singosari. Totalnya hampir 1.000 km. Semuanya kondisi mantap," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Untuk jalan nasional, kondisinya juga sudah sangat siap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran. "Lintas utara sepanjang 1.341 km kondisinya 97%. Lintas tengah 1.197 kondisinya 93%. Hanya pantai selatan Jawa yang kondisinya masih 83%. Kami akan kuat-

kan lagi sampai puncak arus nanti," ucapnya.

Untuk Trans-Sumatra, tol yang sudah beroperasi sepanjang 281 km. Ada juga sepanjang 222 km yang bisa digunakan, tapi bersifat fungsional

"Untuk tol fungsional sudah bisa dilalui karena sudah dilakukan pengaspalan sehingga tidak ada debu di ruas tersebut," tuturnya.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Jawa Tengah, mulai memasang rambu pendahulu penunjuk jurusan (RPPJ) di sejumlah titik persimpangan, kemarin. Tahun ini ada 130 RPPJ yang dipasang. Pemasangan rambu portabel itu selain untuk memandu pemudik agar tidak tersesat, juga untuk mengurangi volume kendaraan pemudik yang masuk kota.

"Pemudik tujuan jarak jauh, baik yang ke arah timur maupun barat kami arahkan supaya tidak masuk kota. Ini untuk menghindari kemacetan karena menjelang Lebaran aktivitas warga di dalam kota juga ramai," kata Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Surakarta, Taufiq Muhammad.

Pemasangan RPPJ mulai dilakukan dari titik-titik yang menjadi pintu masuk menuju Kota Surakarta. Seperti simpang Faroka dan simpang Manahan untuk kendaraan dari arah barat, serta simpang Jurug untuk kendaraan dari arah timur. "Semoga ini bisa membantu dan membuat perjalanan pulang kampung pemudik menjadi lebih nyaman dan lancar," kata Taufiq.

Rekayasa lalu lintas

Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri mengatakan akan ada 93 ribu personel yang siap mengamankan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Pada tahun ini, menurutnya, fokus akan lebih banyak dituangkan di Jawa terutama Tol Trans-Jawa lantaran diterapkannya skema satu arah di sebagian ruas tersebut.

Sistem satu arah, lanjutnya, dikonsepsikan dimulai pada Km 25 di gerbang tol Cibitung sebelum memasuki Cikarang Utara pada Km 29. Dari situ, jalur akan dibuat satu arah dari Jakarta ke Jawa Tengah hingga berhenti di Km 263 gerbang tol Brebes Barat.

Tak hanya pada saat arus mudik, kebijakan satu arah juga akan dilakukan sebalik-

nya, dari Jawa Tengah ke Jakarta, pada saat arus balik.

Mungkin skema arus balik satu arah akan diterapkan pada 8 dan 9 Juni yang diprediksi menjadi periode puncak kepulangan. "Nanti kita mulai di Km 189 gerbang tol Palimanan dan berakhir di Km 29 atau Km 25," jelasnya.

Refdi menilai kebijakan satu arah akan memberikan banyak manfaat. Semua jalur, baik tol, utara, dan selatan akan memiliki peran vital masing-masing.

Ketika di Tol Trans-Jawa dilakukan satu arah, kendaraan dari arah sebaliknya dipastikan memenuhi jalur lainnya sehingga volume kendaraan dapat terdistribusi dengan baik.

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan

(Dishub) Jawa Tengah Bangun Adi mengatakan sekitar 60%-70% dari 8,9 juta jumlah pemudik yang diperkirakan melintas di Jawa Tengah bakal melewati tol sehingga rekayasa lalu lintas bakal diterapkan khususnya di Tol Trans-Jawa.

Nantinya, saat rekayasa one way atau 4 lajur dari Cikarang, kendaraan yang keluar dari tol diarahkan ke Brebes Barat atau Brebes Timur dan menghindari Pejagan karena ada pelintasan kereta api.

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pemudik yang melintas di Jateng diproyeksikan naik 11,5%. Oleh karena itu, ada rekayasa lalu lintas yang bakal diterapkan," jelas Bangun di sela-sela pemantauan jalur di Banyumas, kemarin. (LD/FR/WJ/AS/X-10)

Judul	Libatkan Pemda dalam Penataan Pulau Terluar	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Paradigma penataan pembangunan di pulau terluar perlu diubah agar tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin dilibatkan dalam penataan pulau terluar. Selama ini, pemerintah pusat dianggap terlalu fokus menjaga keutuhan wilayah, tetapi melupakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah perbatasan.		

Libatkan Pemda dalam Penataan Pulau Terluar

Paradigma penataan pembangunan di pulau terluar perlu diubah agar tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah.

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin dilibatkan dalam penataan pulau terluar. Selama ini, pemerintah pusat dianggap terlalu fokus menjaga keutuhan wilayah, tetapi melupakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah perbatasan.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komite I DPD saat berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/5/2019). Dalam kunjungan itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Wakil Ketua II Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, polemik kewenangan tata kelola perbatasan memang berdampak buruk terhadap kesejahteraan warga di daerah terluar. Kepulauan Riau menjadi salah satu yang paling disoroti karena memiliki 22 pulau di wilayah terdepan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah agar kesatuan negara terjaga. Apalagi, sebanyak 22 kabupaten dari total 122 kabupaten tertinggal saat ini berada di wilayah perbatasan.

Staf Khusus Gubernur Ke-

pulauan Riau Ahars Sulaiman mengharapkan, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana khusus bagi pemerintah provinsi untuk mengelola pulau terluar. Pengelolaan dana perbatasan oleh provinsi dirasa akan lebih efektif karena pemerintah setempat lebih mengerti kebutuhan warga di sana.

"Kalau semua diurus pusat hasilnya tidak akan maksimal. Sebaiknya ada pembagian tugas agar anggaran dapat digunakan tepat sasaran. Kewenangan tetap di pusat, tetapi pengelolaan seharusnya bisa diurus daerah," kata Ahars.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Batam Yusfa Hendri mencontohkan, pembangunan yang dilakukan pemerintah di dua pulau terluar, yaitu Pulau Nipa dan Putri, yang masih se-kadar mereklamasi. Keutuhan pulau sebagai batas terluar memang terjaga, tetapi manfaat ekonomi dari pembangunan itu tidak dirasakan warga.

"Warga di pulau terluar kekurangan akses informasi dan transportasi. Pemerintah seharusnya memperhatikan hal itu karena tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Yusfa.

Dari 22 pulau di Kepulauan Riau yang menjadi titik ukur perbatasan dengan negara te-

tangga atau perairan internasional, sebanyak 19 di antaranya adalah pulau karang yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau itu meliputi Hiu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampung, Putri, Tokong Malang, Biru, Damar, Mangkai, dan Tokong Nanas. Selain itu, ada juga Tokong Berlayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senoa, Subi, Kepala, dan Sentut.

Meskipun sudah dibangun prasasti yang antara lain berisi nama pulau, koordinat, dan lambang negara, hampir semua pulau itu tetap kosong dan hanya sesekali disinggahi penduduk atau petugas. Yusfa berharap, pembangunan fasilitas lain akan menyusul agar pulau-pulau itu memiliki manfaat lain dari sekadar batas negara.

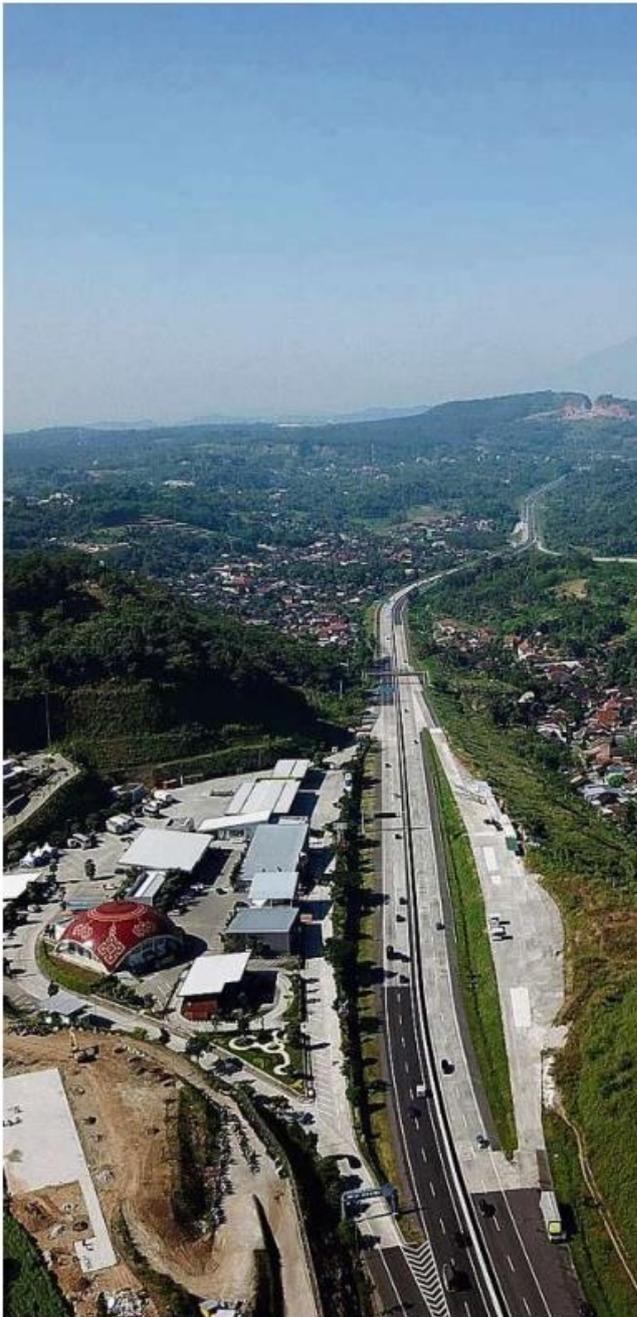
Pengawasan kedaulatan di wilayah laut yang belum optimal juga disorot. Lemahnya pengawasan membuat nelayan berbendera asing bisa lolos masuk dan mengeruk kekayaan laut Indonesia.

Yusfa mengusulkan, pengawasan wilayah perbatasan akan efektif jika melibatkan perangkat di daerah. "Mereka tinggal dan hidup di wilayah itu, pastinya mereka juga memiliki pengetahuan dan kepekaan untuk ikut menjaga kekayaan di perbatasan," kata Yusfa.

(NDU)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Sejumlah fasilitas tempat istirahat bagi pemudik yang melintasi jalan tol mulai disiapkan, seperti di ruas Jalan Tol Semarang-Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019). Sejumlah titik di sepanjang ruas Jalan Tol Trans-Jawa tersebut disiapkan tempat istirahat dengan fasilitas toilet, tempat makan, dan pengisian bahan bakar minyak.		

Fasilitas Tempat Istirahat di Jalan Tol



KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sejumlah fasilitas tempat istirahat bagi pemudik yang melintasi jalan tol mulai disiapkan, seperti di ruas Jalan Tol Semarang-Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019). Sejumlah titik di sepanjang ruas Jalan Tol Trans-Jawa tersebut disiapkan tempat istirahat dengan fasilitas toilet, tempat makan, dan pengisian bahan bakar minyak.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 6)		
Resume	Sejumlah kendaraan melintas di jembatan Kali Kuto, jalur Trans Jawa jalan tol Batang, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jembatan ini dapat mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik Lebaran di Exit Tol Gringsing, Kendal.		

TEMPO / HILMAN FATHURRAHMAN W



Jembatan Kali Kuto. Sejumlah kendaraan melintas di jembatan Kali Kuto, jalur Trans Jawa jalan tol Batang, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jembatan ini dapat mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik Lebaran di Exit Tol Gringsing, Kendal.

Judul	Diskon Tarif Jalan Tol Berlaku Pekan Ini	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 16)		
Resume	Potongan tarif jalan tol dan penyeberangan menjadi siasat mengatur arus pemudik. Kepala Badan Pengatur Jalur Tol, Danang Parikesit, mengatakan pekan ini akan menetapkan adanya diskon tarif jalan tol selama masa mudik Idul Fitri. "Karena sifatnya voluntary, yang akan mengumumkan adalah badan usaha jalan tol (BUJT)," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.		

Diskon Tarif Jalan Tol Berlaku Pekan Ini

Potongan tarif jalan tol dan penyeberangan menjadi siasat mengatur arus pemudik.

Fery Firmansyah
fery_f@tempo.co.id

JAKARTA — Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit, mengatakan pekan ini akan menetapkan adanya diskon tarif jalan tol selama masa mudik Idul Fitri. "Karena sifatnya voluntary, yang akan mengumumkan adalah badan usaha jalan tol (BUJT)," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Danang berujar bahwa diskon tarif jalan tol hanya menunggu keputusan waktu pelaksanaannya. Diskon itu bisa saja diberikan waktu puncak ataupun di luar waktu puncak arus mudik. "Sekaligus mendorong masyarakat untuk mengubah perjalanan dari waktu puncak ke waktu lain dengan instrumen diskon tarif tol."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeliono mengatakan BUJT sudah sepakat untuk memberikan diskon. Nilai potongan tarif, kata dia, diserahkan kepada para operator. Menurut Basoeki, waktu yang tepat untuk menerapkan diskon itu bisa saja di waktu puncak ataupun sebelum dan sesudah puncak. Sehingga jadwal pemudik tidak terkonsentrasi hanya di satu waktu. "Mekanisme diskon kami pakai sebagai instrumen untuk mengatur flow."

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani, mengatakan keputusan soal nilai dan durasi pemberlakuan diskon tarif tol akan diumumkan 10 hari sebelum Idul Fitri, yaitu pada 25 Mei mendatang.

Usulan diskon tarif tol datang dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi. Dia mengusulkan potongan untuk tarif tol Trans Jawa yang dinilai masih mahal. "Saya sudah bicara dengan Bu Desi untuk evaluasi satu bulan ini di mana nanti ada skema diskon," kata Budi dalam diskusi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 8 Februari lalu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti tarif tol Trans Jawa, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan barang atau truk. "Akibat dari hal ini, volume trafik di jalan tol Trans Jawa masih tampak sepi, lengang. Seperti bukan jalan tol saja, terutama selepas ruas Pejagan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Selain di jalan tol, skema diskon untuk mengatur arus pemudik akan diterapkan pada angkutan penyeberangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tengah menyiapkan skema tarif penyeberangan pada malam dan siang hari dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni selamasamudik. "Mungkin dalam beberapa hari ini akan kami tetapkan disparitas harga karena pemudik itu lebih senang jalan malam agar siang sampai di Sumatera," ujar dia dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Budi mengatakan jalur arah Pelabuhan Merak adalah salah satu tumpuan untuk mudik ke arah barat. Pada masa pulang kampung, ia mengatakan jalur tersebut diproyeksikan ada penumpukan dalam jumlah besar pada hari tertentu.

● CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO

Judul	Investor China Siap Danai Tol	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 3)		
Resume	Minat investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia kian kuat, terutama di jalan tol. Perusahaan asal China kabarnya bakal meneken kesepakatan investasi sebesar Rp23 triliun dengan salah satu perusahaan jalan tol di Indonesia.		

Investor China Siap Danai Tol

Bisnis, JAKARTA — Minat investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia kian kuat, terutama di jalan tol.

Perusahaan asal China kabarnya bakal meneken kesepakatan investasi sebesar Rp23 triliun dengan salah satu perusahaan jalan tol di Indonesia.

Hal itu diungkapkan CEO PINA Ekoputro Adijayanto saat berkunjung ke redaksi *Bisnis Indonesia*, Selasa (21/5). Menurut dia, China Communications Construction Company Ltd (CCCC) akan mengambil alih saham di badan usaha jalan tol (BUJT) sekaligus bertindak sebagai kontraktor *engineering, procurement and construction* (EPC).

CCCC, lanjutnya, berminat untuk berpartisipasi di beberapa proyek jalan tol sekaligus (*bundling*), baik yang sudah beroperasi maupun proyek dalam konstruksi. Kendati tidak menyebut proyek jalan tol secara spesifik, Eko mengungkapkan hanya

PT Jasa Marga Tbk. dan PT Waskita Toll Road yang berpotensi menjalin kesepakatan dengan CCCC. "Targetnya semester kedua ini mereka masuk ya, setelah proses *due diligence* [uji tuntas]. Mereka senang untuk masuk *bundling*, karena pekerjaan [konstruksi] akan ada terus menerus."

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), saat ini ada 56 jalan tol yang beroperasi dengan panjang 1.744 kilometer. Selain itu, dalam periode Juni-Desember 2019, ada 19 ruas jalan tol sepanjang 595,69 kilometer yang dijadwalkan beroperasi.

PINA merupakan unit di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas untuk memfasilitasi pembiayaan infrastruktur dari non anggaran. PINA bertugas menggaet investor dan institusi pemilik dana jangka panjang untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek lewat beragam skema pembiayaan kreatif.

Pada 2018, PINA mencetak fasilitas proyek infrastruktur senilai US\$3,3 miliar dari beragam sektor. Eko mengatakan tahun ini PINA membidik fasilitas pembiayaan infrastruktur senilai US\$6 miliar. *(Rivki Maulana)*

BUKAN SIM

Koreksi: Pada judul berita di halaman ini edisi Selasa (21/5) tertulis *SIM Kaji Tambah Penyertaan Modal*, seharusnya *SMI Kaji Tambah Penyertaan Modal*.

Penulisan SIM juga terdapat di alinea kedua berita. Seharusnya adalah SMI.

Mohon maaf atas kesalahan tersebut.

• Redaksi

Judul	Pemindahan Ibukota: APBN Alokasikan Rp36 Triliun	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 4)		
Resume	Anggaran pemerintah yang akan dipakai untuk pembiayaan pemindahan ibukota diperkirakan hanya sekitar 7,72% atau sekitar Rp36 triliun dari total biaya pemindahan ibukota yang mencapai Rp466 triliun. Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Eko Putro Adijayanto menegaskan bahwa skema pendanaan yang akan dipakai adalah model kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership/PPP).		

► PEMINDAHAN IBU KOTA

APBN Alokasikan Rp36 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Anggaran pemerintah yang akan dipakai untuk pembiayaan pemindahan ibu kota diperkirakan hanya sekitar 7,72% atau sekitar Rp36 triliun dari total biaya pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun.

Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Eko Putro Adijayanto menegaskan bahwa skema pendanaan yang akan dipakai adalah model kerja sama pemerintah dan badan usaha (*public private partnership/PPP*).

"Saya rasa karena ini proyek *greenfield*, saya yakin sebagian besar menggunakan PPP," ujar Eko dalam kunjungannya ke Redaksi *Bisnis Indonesia*, Selasa (21/5).

Di dalam skema PPP, anggaran pemerintah tidak perlu terlibat untuk memberikan penjaminan karena sudah ada perusahaan penjaminan seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Intinya, Bappenas berharap anggaran yang digunakan dalam pemindahan ibu kota dapat lebih efisien.

Terkait dengan investor yang akan terlibat, Eko belum bisa memastikan. Saat ini, Bappenas tengah menyusun *master planning* atau rencana induk pemindahan ibu kota ini. Setelah itu, dia memperkirakan detail *engineering design* (DED) baru akan selesai pada 2020.

"Sekarang [*master planning*] sedang kami siapkan tidak hanya dari sisi lingkungan dan sosial, tetapi yang menarik dari sisi estetikanya juga," ungkap Eko.

Adapun, penetapan kota yang akan menjadi ibu kota baru akan diumumkan

langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pengumuman ibu kota baru tersebut bisa dilakukan tahun ini. Pilihan kota yang ada sudah mengerucut pada dua titik, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sesuai dengan lokasi yang telah dikunjungi presiden dan Kepala Bappenas.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyatakan bahwa *ground breaking* pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan akan dilakukan pada 2021.

"Pada 2021 itu kami rencanakan untuk *ground breaking*," tutur Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai menggelar Rapat Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, di Gedung Bappenas, terkait Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Rabu (15/5).

Bambang menyatakan bahwa sebelum dilakukan *ground breaking* akan dilakukan penyiapan lapangannya terlebih dahulu mulai setahun hingga 2 tahun ke depan. "Proses penyiapan di lapangan bisa dimulai 1-2 tahun ke depan," tuturnya.

Dia menegaskan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan akan mulai mengumumkan nama calon ibu kota baru yang bakal dipakai sebagai lokasi pembangunan tersebut.

"Tadi kami rapat koordinasi untuk finalisasi kajian pemindahan ibu kota baru. Tahun ini akan diputuskan kota dan lokasinya," ujarnya.

Menurutnya, pascapengumuman pemilihan lokasi pada tahun ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), disusul perencanaan, baik *masterplan* kota maupun perencanaan kawasannya oleh Kementerian PUPR.

Selain itu, lanjut Bambang, Kementerian PUPR baru akan mulai menyiapkan infrastruktur dasarnya di lokasi yang bakal dijadikan ibu kota baru tersebut. Adapun, pada 2024, ditargetkan sudah dapat digunakan secara fungsional.

"Setelah diumumkan tahun ini kemudian masuk ke perencanaannya, baik masterplan kota dan perencanaan kawasannya. Rencananya untuk yang *government* itu sekitar 2.000 hektare, dan keseluruhan kotanya 40.000 hektare," terangnya.

Menteri Bappenas pun memastikan bahwa proses pembangunan kawasan ibu kota akan meminimalkan penggunaan dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan akan lebih banyak melibatkan swasta, BUMN, maupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa rencana *ground breaking* pada 2021 tersebut masih harus diusulkan dan mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi.

"Rencana *ground breaking* itu nanti diusulkan dulu kepada presiden," ujarnya. Menurutnya, *ground breaking* tersebut apakah pada awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir 2021, nanti berdasarkan putusan Presiden Jokowi. (*Hadiljah Alaydrus*)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 4)		
Resume	Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5). Rapat membahas persiapan penyediaan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik Lebaran 2019.		

► **SARANA TRANSPORTASI MUDIK**



Antara/Indrianto Eko Suwanto

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,

Jakarta, Selasa (21/5). Rapat membahas persiapan penyediaan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik Lebaran 2019.

Judul	Sistem Satu Arah: Dilema di Balik Euforia Trans-Jawa	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Seolah ingin mengulang kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran pada tahun lalu, pemerintah tampak melakukan persiapan cermat menjelang mudik pada tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemudik yang tinggal di Jabodetabek kini bisa menikmati jalan tol Trans-Jawa yang sudah tersambung dari Merak hingga Probolinggo. Secara keseluruhan, jalan tol yang tersambung Merak—Probolinggo mencapai 964 kilometer.		



Krizia P. Khandi & Rivki Maulana
redaksi@bisnis.com

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemudik yang tinggal di Jabodetabek kini bisa menikmati jalan tol Trans-Jawa yang sudah tersambung dari Merak hingga Probolinggo. Secara keseluruhan, jalan tol yang tersambung Merak—Probolinggo mencapai 964 kilometer.

Seperti yang telah diduga, jalan tol yang sudah tersambung bakal memicu kenaikan lalu lintas di jalan bebas hambatan. Kementerian Perhubungan melansir, total jumlah pemudik tahun ini bakal mencapai 23 juta atau naik 6,40% dibandingkan dengan tahun lalu.

Kemenhub memperkirakan hampir 400.000 kendaraan pribadi bakal melintas di jalan tol saat masa Angkutan Lebaran 2019.

► **Sistem satu arah akan diterapkan untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan saat mudik.**

sistem satu arah yang akan diterapkan selama 24 jam pada periode yang ditentukan tidak berpihak kepada angkutan umum.

Berdasarkan perhitungan IPOMI, selama 3 hari puncak arus mudik, 490.000 kendaraan pribadi bakal melintas dengan jumlah penumpang yang diangkut 3,10 juta sampai dengan 3,20 juta.

Dengan jumlah penumpang yang sama, angkutan bus hanya membutuhkan 106.000 unit bila satu bus berkapasitas 30 kursi. Jumlah unit bakal makin menciut bila kapasitas bus diasumsikan 40 kursi.

Senada dengan IPOMI, rencana penerapan sistem satu arah juga dikecam oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Jumlah itu setara 40% dari jumlah pemudik yang memilih menggunakan moda angkutan darat saat pulang ke kampung halaman nanti.

Pada setiap perhelatan mudik, setidaknya tiga instansi saling bahu membahu.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bertanggung jawab terhadap kondisi jalan nasional, baik jalan tol maupun jalan bukan tol.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan angkutan darat, laut, dan udara.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) juga mempunyai wewenang besar dalam mengatur arus lalu lintas.

Di tengah euforia tol Trans-Jawa, sebuah rencana kontroversial mengemuka, yakni penerapan sistem satu arah atau one way selama arus mudik dan arus balik.

Pemerintah berencana menerapkan sistem satu arah di tol Jakarta—Cikampek hingga tol Cikopo—Palimanan pada 30 Mei hingga 2 Juni. Jalan tol hanya boleh dilewati kendaraan dari arah Jakarta menuju arah timur seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Penerapan sistem satu arah berlaku sebaliknya pada 7—9 Juni 2019. Kendaraan yang berlawanan dengan lajur sistem satu arah diminta agar tidak menggunakan jalur tol dan menggunakan jalan nasional. Tak pelak, hal ini menuai protes dari sejumlah kalangan.

Kalangan pengusaha bus, misalnya, mengaku kecewa terhadap rencana penerapan sistem satu arah.

Bkatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

IPOMI menilai penerapan sistem satu arah dikhawatirkan membuat pergerakan bus terhambat.

"Kebijakan satu arah selama 24 jam selama 30 Mei, 1—2 Juni akan berdampak pada terlambatnya armada bus dan angkutan umum lainnya masuk ke Jakarta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur," tulis pengurus IPOMI.

IPOMI juga menilai kebijakan

Tulus Ahadi, Ketua Harian YLKI, mengatakan bahwa penerapan sistem satu arah akan membuat daerah penyangga di Bekasi akan sangat padat.

BERJENJANG

Dia mengimbau agar pemerintah tidak menerapkan sistem satu arah selama 24 jam penuh. YLKI mengusulkan penerapan secara berjenjang, mulai dari 6 jam hingga interval waktu yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.

"Jangan sampai 3 hari berturut-turut 24 jam, itu ada yang terkunci di Bekasi, penumpang atau pemudik di Jakarta bisa mengalami keterlambatan yang sangat parah. Jadi, jangan memudahkan yang lain, tetapi mengorbankan yang lain," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PUPR Basuk Hadimuljono menyerahkan sepenuhnya wewenang penerapan sistem satu arah kepada Korlantas.

Kendati mempunyai wewenang atas jalan nasional, dia menyebutkan bahwa manajemen lalu lintas sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.

"Kan saya bilang ada tiga hal supaya mudik nyaman dan aman. Satu prasarana, dua manajemen lalu lintas, tiga perilaku pengguna jalan. Nah, saya sudah menyediakan prasarannya maksimal, manajemen dikomandoi oleh Korlantas [Kepala Korlantas]," ujarnya.

Dia menyebut rencana penerapan sistem satu arah sudah dikaji dengan matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Meski menimbulkan polemik, sistem satu arah akan diterapkan untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan saat mudik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan mempertimbangkan saran dari IPOMI dan kalangan yang tidak setuju atas rencana penerapan sistem satu arah.

Dia akan terus melakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. "Nanti kami diskusikan, ini masih terbuka dilakukan suatu upaya perbaikan," tuturnya. ■

Judul	Mudik Lebaran: Perbaikan Jalan Lintas Sumatra Diutamakan	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kementerian PUPR fokus memperbaiki jalan nasional di Sumatra menjelang masa angkutan mudik Lebaran 2019. Kondisi jalan nasional di Sumatra masih mengalami kerusakan di beberapa titik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kondisi jalan di Sumatra perlu mendapat perhatian lebih karena kondisinya kurang siap dilintasi pemudik dibandingkan dengan di Jawa. Kemantapan jalan di lintas utara, tengah, dan selatan Jawa mencapai di atas 93%.		

► MUDIK LEBARAN

Perbaikan Jalan Lintas Sumatra Diutamakan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat fokus memperbaiki jalan nasional di Sumatra menjelang masa angkutan mudik Lebaran 2019. Kondisi jalan nasional di Sumatra masih mengalami kerusakan di beberapa titik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kondisi jalan di Sumatra perlu mendapat perhatian lebih karena kondisinya kurang siap dilintasi pemudik dibandingkan dengan di Jawa. Kemantapan jalan di lintas utara, tengah, dan selatan Jawa mencapai di atas 93%.

“Secara *policy*, H-10 semua pekerjaan perbaikan akan diselesaikan dan Sumatra itu perlu mendapat perhatian,” ujarnya selepas rapat dengan Komisi V DPR, Selasa (21/5).

Menurut Basuki, perbaikan jalan nasional di Sumatra terlambat dilakukan karena ada dua kali kegagalan lelang. Untuk itu, Kementerian PUPR bakal mengebut perbaikan jalan di Sumatra agar siap dilintasi pemudik.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa panjang jalan nasional di Sumatra tercatat 7.918 kilometer. Kemantapan jalan rata-rata di Sumatra sudah di atas 90%.

Jalan nasional merupakan akses utama yang disediakan negara untuk masyarakat. Untuk itu, kenyamanan dan keselamatan berkendara tetap menjadi prioritas yang tengah diupayakan oleh pemerintah.

Di Sumatra, jalan nasional juga terbagi menjadi tiga lintas, yakni jalan lintas timur, tengah, dan barat. Kondisi jalan nasional di Sumatra, kata Sugiyartanto,

belum sepenuhnya mantap.

Dia menuturkan bahwa saat ini perbaikan jalan sudah dilakukan berupa penambalan lubang. Perbaikan pada taraf itu merupakan penanganan maksimal yang bisa dilakukan dalam jangka pendek.

“Ada yang baru memulai kontrak Februari sehingga [perbaikan] belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi, masih ada kondisi jalan bergelombang.”

Bisnis sempat melintasi jalan lintas Sumatra di Sumatra Selatan hingga Lampung pada awal Mei 2019. Jalan nasional sepanjang 279 km dari Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir hingga Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tidak sepenuhnya mantap.

Kondisi jalan di lintas tersebut banyak lubang, terutama di di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Kondisi jalan lebih baik saat memasuki Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung. Secara keseluruhan perlu waktu 9 jam untuk menempuh jarak 279 km di jalintim atau kecepatan rata-rata hanya 31 km per jam. *(Rivki Maulana)*

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 22 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Foto aerial perumahan KPR subsidi di Kampung Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat setidaknya hingga Mei 2019, jumlah capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah mencapai angka 318.835 unit.		

► **CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH**



Antara/Adeng Bustomi

Foto aerial perumahan KPR subsidi di Kampung Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan mencatat setidaknya hingga Mei 2019, jumlah capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah mencapai angka 318.835 unit.